

Nomor : 008/HMS/SP/II/2024
Tanggal : 11 Februari 2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Petakan 22 Indikator TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum--- Bawaslu petakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilu 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi (kecuali Daerah Otonomi Baru Papua dan Maluku Utara) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3 s.d 8 Februari 2024. Variabel dan indikator TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, DPK, dan KPPS di luar domisili). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi). *Ketiga*, kampanye (politik uang dan/atau ujaran kebencian di sekitar TPS). *Keempat*, netralitas (penyelenggara, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Kelima*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan). *Keenam*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, dan/atau lokasi khusus). *Ketujuh*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

7 (Tujuh) Indikator TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) 119.796 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) 38.595 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 4) 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- 5) 21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu
- 6) 18.656 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); dan
- 7) 10. 794 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan/atau gempa).

14 (Empat Belas) Indikator TPS Rawan Yang Banyak Terjadi

- 1) 8.099 Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
- 2) 4.862 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 3) 4.211 TPS sulit dijangkau;

- 4) 3.875 Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS;
- 5) 2.299 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
- 6) 2.209 Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu;
- 7) 2.021 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik);
- 8) 1.989 Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan;
- 9) 1.587 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan;
- 10) 1.582 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan;
- 11) 1.396 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan;
- 12) 1.205 TPS yang ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
- 13) 1.184 TPS di Lokasi Khusus; dan
- 14) 1.031 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu;

1 (Satu) Indikator TPS Rawan Yang Banyak Terjadi

814 TPS yang terdapat Praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS

Jumlah TPS Rawan yang terpetakan diatas belum termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua dan Maluku Utara. Kondisi demikian disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet pada saat pengiriman data.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Peserta Pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media dan seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilu yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilu dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran TPS Rawan Dalam Satuan Provinsi

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri)	125.224	Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Lampung
2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)	119.796	Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)	18.656	Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Timur
4. Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	38.595	Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Barat
5. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	2.299	Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Lampung
6. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu	2.209	Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Sumatera Barat
7. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS	3.875	Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara
8. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS	814	Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Lampung, Maluku
9. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu	1.031	Jawa Barat, Lampung, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur
10. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan	1.205	Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Aceh

yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu		
11. Memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan	1.582	Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat
12. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan	1.989	Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Selatan
13. Memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan	1.396	Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
14. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan	1.587	Jawa Barat, DKI Jakarta, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku
15. TPS sulit dijangkau	4.211	Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur
16. TPS di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	10.794	Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan
17. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	4.862	Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur
18. TPS dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	2.021	Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Lampung
19. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu	21.947	Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Lampung, Bali, Sumatera Barat
20. TPS di Lokasi Khusus	1.184	Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur
21. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	36.236	Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur
22. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	8.099	Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan Tengah